

**PELAKSANAAN PEMANFAATAN ASET TETAP DAERAH
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KOTA PALEMBANG**

Reza Dwika Pahlawan
NPP. 29.0370

*Asdaf Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Keuangan Publik*

Email: Rezadwikap50@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Utilization of regional fixed assets by the Regional Financial and Asset Management Agency of Palembang City has a role in increasing local revenue to support operations carried out by the government in an effort to improve services and community welfare. **Objective:** to see how the implementation of the utilization of regional fixed assets carried out by the Palembang City Government and find out what are the inhibiting factors and the efforts made to overcome these inhibiting factors. **Methods:** The research method used is a qualitative descriptive study with a descriptive approach. inductive. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Results/Findings:** the utilization of assets carried out by the Palembang City government in increasing local revenue in the Palembang City has been carried out optimally so that it is able to support the implementation of the Government carried out by the Palembang City Government, but in practice there are still some obstacles such as the limited provision of funds for priorities sustainable development, ineffective performance-based budgeting instruments, and inaccurate data and timeliness of budget disbursement. **Conclusion:** the conclusion in this study is that the utilization of assets carried out by the Palembang City government in increasing local revenue in Palembang City has been carried out optimally.

Keywords: *Financial Management Agency, Utilization of Regional Fixed Assets, Regional Original Income*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemanfaatan Aset tetap daerah oleh Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Palembang memiliki peran dalam peningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang operasional yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. **Tujuan:** untuk melihat bagaimana pelaksanaan pemanfaatan aset tetap daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dan mencari tahu apa saja faktor penghambat serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** pemanfaatan aset yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Palembang telah di lakukan secara optimal sehingga mampu menunjang pelaksanaan Pemerintahan

yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang, namun dalam pelaksanaannya tetap ada beberapa hambatan seperti keterbatasan penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan, instrumen penganggaran berbasis kinerja yang kurang efektif, dan tidak akuratnya data dan ketepatan waktu pencairan anggaran. **Kesimpulan:** kesimpulan pada penelitian ini adalah pemanfaatan aset yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Palembang telah dilakukan secara optimal.

Kata kunci: *Badan Pengelolaan keuangan, Pemanfaatan Aset Tetap Daerah, Pendapatan asli Daerah*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

pemerintah daerah diberikan kewenangan secara proporsional oleh pemerintah pusat guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan secara adil bagi masyarakat. Dimana kewenangan tersebut berupa pengalokasian dana perimbangan dan memberikan hak kepada daerah untuk mengelola potensi daerahnya dan menjadi sumber pendapatan daerah. Salah satu wujud dari pemberian kewenangan tersebut adalah pengelolaan barang milik daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pengertian Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Penjelasan di atas mengamanatkan bahwa Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya.

Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda bergerak dan benda yang tidak bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible), yang tercakup dalam aktiva/ kekayaan atau harta dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu/perorangan. Aset tetap adalah salah satu item dalam neraca bersama aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap memegang peranan yang sangat penting karena memiliki nilai yang signifikan dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 7, aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, irigasi, dan jaringan, Aset tetap lainnya, dan Kontruksi Dalam Pengerjaan. Menurut Permendagri No. 19 tahun 2016 pasal 81 telah mengatur bentuk pemanfaatan aset daerah yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pengelolaan berupa pemanfaatan aset tetap daerah dapat dilakukan dengan cara sewa, Pinjam Pakai, Kerja sama pemanfaatan, Bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Kota Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, dalam mengurus pemerintahannya Kota Palembang membutuhkan anggaran dan pemasukan keuangan agar mampu melaksanakan urusan pemerintahan dengan baik. Maka, salah satu sumber pendapat daerah yang dapat diandalkan

adalah pendapatan asli daerah (PAD). Pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan (aset) merupakan sumber pemasukan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. kontribusi lain-lain pendapat asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Palembang masih sangat minim yaitu tidak mencapai angka 20% pada tahun 2018 dan 2019. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan aset tetap daerah di Kota Palembang pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan di banding pendapatan yang diperoleh ditahun 2018. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kota Palembang untuk melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan aset tetap yang ada secara maksimal agar pendapatan asli daerah setiap tahunnya juga meningkat. Sehingga penyelenggaraan urusan pemerintah di Kota Palembang dapat terlaksana secara maksimal. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pemanfaatan Aset Tetap Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang”**.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Penjelasan di atas mengamanatkan bahwa Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga akan terjadi penurunan nilai (terdepresiasi) seiring berjalannya waktu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah wajib untuk memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki guna menambah PAD daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah itu sendiri yaitu kemandirian.

Kota Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, dalam mengurus pemerintahannya Kota Palembang membutuhkan anggaran dan pemasukan keuangan agar mampu melaksanakan urusan pemerintahan dengan baik. Maka, salah satu sumber pendapat daerah yang dapat diandalkan adalah pendapatan asli daerah (PAD). Namun kenyataan yang ada dilapangan menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh oleh Kota Palembang melalui pendapatan asli daerah (PAD) masih mengalami penurunan setiap tahunnya. Selain itu, persentase Realisasi dari Pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Palembang juga mengalami penurunan semenjak tahun 2017. Ini merupakan suatu kesenjangan yang terjadi dimana Pemerintah Kota Palembang yang membutuhkan dana PAD namun PAD yang didapatkan setiap tahun selalu menurun jumlahnya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang digunakan sebagai acuan dan juga petunjuk untuk melakukan penelitian selanjutnya. Penulis telah memilih beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian yang akan dibahas, seperti penelitian yang dilakukan oleh (S, **Ikbar, 2017**) tentang Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pengelolaan Aset Tetap Oleh Pemda secara keseluruhan sesuai Yang Diatur Dalam

PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016, Walaupun belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD). Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Nur Aziza, 2019) yang berjudul Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah permasalahan aset tetap daerah di Indonesia terutama pada beberapa tempat yang telah dibahas di atas adalah Administrasi yang kurang baik dimana masih ada yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku atau belum menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Pemerintah Daerah juga masih belum mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap dimana masih ada jenis pemanfaatan. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Nurina, 2014) yang berjudul Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan metode penelitian Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah strategi optimalisasi pengelolaan aset daerah yang dilakukan BPKAD belum mencapai maksimal, hal ini diketahui dari kurang optimalnya pelaksanaan salah satu strategi optimalisasi pengelolaan aset daerah yaitu identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Cahyono, 2013) yang berjudul Keefektifan Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan pengelolaan pasar belum efektif karena terkendala beberapa hambatan. Penelitian acuan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh (Fandi, 2015) dengan judul Analisis Kinerja DPKAD Dalam Pengelolaan Pajak Hotel Guna Meningkatkan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil di lapangan menunjukkan bahwa, untuk dapat menggali dan mengenal potensi serta kebutuhan Wajib Pajak untuk memberikan pelayanan hotel dan mendapatkan hasil maksimal dalam pelaksanaan pemungutan pajak Dpkad kota semarang yang dihadapi proses pengambilan keputusan tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 untuk mempertahankan eksistensi hotel bisnis sebagai sumber pendapatan. Meskipun pertumbuhan penerimaan pajak hotel fluktuatif dan tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD tapi hasil penarikan pajak hotel lima tahun terakhir Kota Semarang termasuk dalam kategori sangat efektif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu lokasi penelitian yang digunakan sebagai tempat penelitian. Penelitian (Cahyono, 2013) yang melaksanakan penelitian di Pasuruan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Kota Palembang. Selain lokasi penelitian, kebaruan juga ada pada fokus penelitian, seperti penelitian (Ikbar, 2017) yang berfokus kepada pengelolaan aset tetap sesuai undang-undang. Sedangkan penelitian kali ini hanya berfokus terhadap pemanfaatan aset tetap daerah yang bertujuan untuk meningkatkan PAD di Kota Palembang. Selain itu terkait dengan tujuan penelitian dilaksanakan yang contohnya Penelitian (Nur Aziza, 2019) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset terhadap optimal atau tidaknya pemanfaatan aset tetap daerah Sedangkan tujuan dari penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana pemanfaatan aset tetap daerah di kota Palembang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana pelaksanaan pemanfaatan aset tetap daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dan mencari tahu apa saja faktor penghambat serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut.

II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan pemanfaatan aset tetap daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dan mencari tahu apa saja faktor penghambat serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 7 orang yang diambil dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) beserta jajarannya. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori Implementasi. Indikator dari pelaksanaan akan terdiri atas serangkaian gambaran (perihal atau keadaan) mengenai dinamika pergerakan implementasi kebijakan. Menurut Muchlis dalam bukunya Kebijakan Publik (2015:105) gambaran indikator dari implementasi tersebut berkaitan dengan dinamika yaitu Produktivitas, Linier, dan Efisiensi.

3.1. Pelaksanaan Pemanfaatan Aset Tetap Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dalam pelaksanaan pemanfaatan aset tetap daerah sudah melakukan dengan optimal, dimana dilihat dari keadaan umum wilayah kota Palembang yang aktifitas dari penduduk kota Palembang yang memanfaatkan dalam kegiatan usaha dan wisata dari aset yang ada, semua pihak dari pemerintahan terlibat aktif baik untuk keamanan, kenyamanan dan kebersihan dilingkungan kota Palembang serta seluruh pihak dari pemerintahan menjaga keadaan aset tersebut, berikut ini mengenai pelaksanaan dalam pengelolaan aset di kota Palembang. Berikut akan dijelaskan implementasi berdasarkan indikator implementasi menurut Muchlis (2015:105): **Produktivitas**, adalah suatu yang menunjukkan tercapainya suatu target yang ditentukan sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kota Palembang ini menunjukkan data yang memuaskan dan sebagian besar mencapai target dan ada juga hampir mencapai target seperti tabel yang dijelaskan berikut.

Produktivitas Pemanfaatan Aset tetap Daerah Kota Palembang

No	Tahun	Target Pencapaian	Realisasi	Keterangan
1.	2019	Rp. 388.000.000	Rp. 1.370.644.824	Sesuai Target
2.	2020	Rp. 1.000.000.000	Rp. 395.582.947	Tidak Sesuai Target
3.	2021	Rp. 600.000.000	Rp. 756.280.697	Sesuai Target

Sumber : BPKAD Kota Palembang

Pada tahun 2019 pemanfaatan aset tetap daerah dalam realisasinya telah mencapai target yang diharapkan, namun pada tahun 2020 dikarenakan pandemi covid-19 yang melanda maka banyak dari pengguna aset tetap daerah tersebut tidak mampu membayar sewa ataupun biaya yang telah ditetapkan Pemerintah, selain itu juga terdapat banyak kebijakan-kebijakan terkait penerimaan daerah seperti *amnesty* sehingga pada tahun 2020 realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan. pada tahun 2021 dikarenakan telah berkurangnya pandemi yang melanda dan terdapat kebijakan *new normal* sehingga aktivitas masyarakat perlahan mulai kembali berjalan maka realisasi dari pendapatan yang di peroleh dari pemanfaatan Aset Tetap daerah pada tahun 2021 kembali mencapai target yang telah di tetapkan. **Linieritas** adalah kegiatan pemanfaatan aset daerah ini sesuai dengan prosedur yang dilakukan dimana semua menjalankan tugasnya sesuai dengan struktur organisasi. Struktur Organisasi yang dimaksud adalah struktur organisasi BPKAD Kota Palembang. Terlihat bahwa Struktur organisasi sudah dibagi berdasarkan tugas dan fungsinya dengan sangat jelas sehingga dapat memperlancar kegiatan program yang dijalankan oleh organisasi. **Eisiensi** adalah pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan dan tanpa adanya sumber daya yang terbuang percuma. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya untuk pemanfaatan aset telah efisien yang dilihat dari beberapa aset yang rutin setiap bulannya menghasilkan income atau pemasukan bagi kota Palembang, dimana kegiatan penggunaan sumber daya ini melalui Sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memudahkan dan membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3.2. Faktor Penghambat dan Pendukung

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka beberapa **Faktor Penghambat** yang ada dalam pemanfaatan aset yaitu keterbatasan penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan dimana dalam proses pendanaan melalui prosedur pengajuan anggaran keperintah pusat, belum optimalnya penyediaan instrument penganggaran berbasis kinerja yang efektif dimana dalam penentuan instrument disesuaikan dengan kebutuhan yang ada saja, efisien dan akuntabel, Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan dimana dalam pencairan dalam waktu yang tidak sesuai dengan target realisasi, Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset daerah yang masih kesulitan dalam penggunaan teknologi,

Pengintegrasian *system* aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan perangkat hardware teknologi yang tidak kompatibel, Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance yang belum disiapkan berupa web informasi, perundang-undangan yang senantiasa berubah dalam waktu yang relatif singkat dan juga antara perundangan yang satu dan yang lainnya kadang berbenturan.

Selain itu dari **faktor pendukung** menjelaskan bahwa hal yang dapat dilakukan adalah Tersedianya peraturan yang memadai tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi pijakan atau dasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengalaman empiris dari sumberdaya manusia dibidang, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang cukup lama sehingga dapat menunjang pelaksanaan kerja dengan baik, Kewenangan dan Tanggungjawab yang jelas dan sudah ditetapkan, Jumlah SDM secara struktural dan fungsional umum dengan rata-rata berpendidikan, sarjana yang terdistribusi pada sekretariat dan bidang-bidang dioptimalkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sarana dan prasarana yang dimiliki pada saat ini diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Pengelolaan keuangan dan aset daerah organisasi secara otonomi diharapkan dapat memfasilitasi tugas pokok dan fungsi sebagaimana volume kebutuhan dan waktu yang ditentukan, Kondisi kerja yang kondusif diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3.3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan Pemanfaatan aset tetap daerah di Kota Palembang saat ini telah melakukan berbagai upaya-upaya sehingga pemanfaatan aset tetap daerah di Kota Palembang dapat dimanfaatkan secara maksimal,. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan Cara mempromosikan aset-aset yang ada melalui media cetak dan media elektronik sehingga masyarakat diharapkan akan tertarik menggunakan aset yang ada. Selanjutnya pemerintah Kota Palembang juga melakukan Kerjasama dengan perusahaan swasta maupun perusahaan mliki daerah guna menyewakan dan memaksimalkan aset yang ada seperti penyewaan ruang untuk mesin atm yang dilakukan oleh bank swasta maupun bank daerah sehingga tidak ada aset yang terbengkalai.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Maka Pelaksanaan pemanfaatan aset tetap daerah sudah berjalan dengan baik dilihat dengan realisasi pada tahun 2021 yang mencapai target dan bahkan melebihi target. Ini merupakan salah satu prestasi yang dimiliki oleh Kota Palembang dimana disaat Pemerintahan Daerah lainnya belum bisa memanfaatkan potensi daerah atau Asetnya dengan baik, Kota Palembang malah sebaliknya dengan mencapai target pendapatan daerah 3 tahun berturut-turut walaupun tahun 2020 mengalami sedikit penurunan namun masih dimaklumkan karena pandemic yang melanda. Ini merupakan hasil penelitian yang sangat bertolak belakang dengan penelitian terkait dengan pengelolaan aset daerah di daerah lainnya seperti penelitian yang dilakukan oleh (Ikbar, 2021) yang menemukan bahwa Pengelolaan Aset Tetap Oleh Pemda secara keseluruhan sesuai Yang Diatur Dalam PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016, Walaupun belum semua terlaksana dengan maksimal. Sehingga dari semua penelitian acuan yang digunakan, belum ada yang mendapatkan hasil yang bagus, namun pada penelitian ini, target PAD Kota Palembang sudah tercapai dengan baik dan maksimal.

IV. KESIMPULAN

Penulis berkesimpulan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dalam pelaksanaan pemanfaatan aset tetap daerah sudah produktif terbukti dengan nilai realisasi mencapai 100 persen dari tahun 2018-2021. Selain itu juga, Pemanfaatan aset di Kota Palembang juga telah sesuai prosedur dalam pelaksanaannya sehingga kegiatan dilakukan dengan mengikuti struktur organisasi dan rencana kerja sehingga dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Selanjutnya pemanfaatan aset di Kota Palembang telah efisien, hal ini dapat dilihat dari beberapa aset yang rutin setiap bulannya menghasilkan pemasukan bagi Kota Palembang. Ada beberapa hambatan pada pengelolaan aset daerah ini yang salah satunya adalah perangkat hardware yang kurang mendukung. Upaya yang telah dilakukan oleh BPKAD sudah banyak yang salah satunya penggunaan sumber daya bagi teknologi maupun sumber daya manusia dalam pemanfaatan aset di Kota Palembang sehingga memperoleh pemasukan sesuai dengan target yang diharapkan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan aset daerah kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi kegiatan pengelolaan keuangan aset daerah sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. Selain itu kepada seluruh masyarakat yang bersedia untuk meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalan informasi serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2017. *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Artha Wulandari, Phaureula dan Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta : Deepublish.
- Carunia, Mulya Firdausy. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.

Djanegara, Moermahadi. 2017. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik, dan Permasalahan*. Bogor: Kesatuan Press.

Dr. Sandu Siyoko, SKM., M. K. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. (Ayup, Ed). Kediri: literasi Media Publishing

Dwi Martini. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Selemba Empat

Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*.

Bogor: Ghalia Indonesia

Yogyakarta : UPP STIM YKPN

